

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu Etnisitas adalah isu yang sangat rentan menjadi komoditi politik pada setiap Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan etnis bisa saja dimobilisasi dan dimanipulasi hanya untuk kepentingan beberapa kelompok. Keheterogenan bangsa Indonesia, merupakan faktor yang menyebabkan politisasi etnis berkembang di masyarakat. Heterogenitas adalah warna tersendiri dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Tentunya perbedaan tersebut merupakan entitas kebangsaan yang harus dibanggakan, karena dari kebhinekaan itu pula integrasi nasional terbentuk, walaupun konsekuensi logis dari negara kebangsaan yang heterogen adalah resiko terkotak-kotak dan ancaman timbulnya disintegrasi.

Anggapan ini muncul dikarenakan unsur kelompok akan selalu ada tatkala rasa keadilan sudah diluar ambang toleransi. Disamping itu, sikap-sikap kelompok yang horizontal (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam masyarakat bangsa kita juga ada suasana kelompok yang dibangun secara vertikal (hubungan yang terjadi karena faktor profesi, implikasi dari hubungan ekonomi). Ikatan-ikatan kedaerahan pun dapat menjalin persatuan antar etnis tersebut, tetapi dilain pihak ikatan-ikatan tersebut dapat juga dimanfaatkan segelintir orang untuk mewujudkan kepentingannya.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan wujud dari pembelajaran demokrasi untuk tingkat daerah. Karena pada tingkat daerahlah konflik-konflik politik sangat rentan terjadi. Pilkada bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola pikir lama yang lebih menempatkan Kepala Daerah sebagai penguasa yang harus dilayani, semestinya dirubah secara radikal menjadi pemimpin yang sesungguhnya bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, semua energi daerah perlu dicurahkan untuk memilih pemimpin terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya selama proses pilkada. Disinilah pentingnya kampanye program yang harus dikedepankan, dari pada kampanye yang hanya mengeksploitasi isu-isu primordial, betapapun hal itu sulit dihindari. Merebaknya konflik yang terjadi di daerah yang sebelumnya aman, merupakan realitas bahwa sumber konflik tidak hanya bermuara pada permasalahan primordial atau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana yang banyak dicemaskan selama ini, tetapi juga hal-hal lain.

Menguatnya isu politisasi etnis dalam pelaksanaan pilkada merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Penguatan politisasi etnis sebenarnya dalam batas-batas tertentu bermakna positif, misalnya untuk menguatkan ikatan primordial/kedaerahan yang selama ini semakin terdegradasi karena terkikis oleh arus modernisme dan budaya materialisme.

Politik etnisitas sendiri merupakan :

“praktek politik yang berdasarkan identitas kelompok etnis, yang merupakan kontras dari praktek politik yang berdasarkan kepentingan (*interest*). Politik etnisitas merupakan bentuk mobilisasi politik atas dasar identitas kolektif etnis, yang sebelumnya disembunyikan, ditekan, atau diabaikan oleh kelompok dominan atau oleh agenda politik. Dengan demikian politik etnisitas menggunakan etnis sebagai basis tindakan politik, bukan berbasis pada kepentingan. Dengan kata lain, jika etnis dijadikan sebagai instrumen politik maka terjadilah politisasi etnis”.(Sumber : Maryanah, Tabah. 2007. Politisasi Etnis : *Strategi Politik Etnis Lampung Memanfaatkan Liberalisasi Politik dalam Rekrutmen Jabatan Publik di Provinsi Lampung Tahun 1999-2007*. Tesis. Program Studi Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.)

Berbagai bentuk ikatan primordialisme/etnis yang melekat dalam alam bawah sadar manusia itu mudah sekali dibangkitkan atau ditumbuhkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan. Oleh karena itu, mereka yang merasa terikat dalam ikatan primordial mudah sekali digerakkan atau dimobilisasi untuk tujuan politik seperti pilkada, apalagi jika pelaksanaan pilkada itu dimaknai sebagai suatu ancaman terhadap kepentingan dan eksistensi kelompok etnis tertentu.

Kelompok etnis yang merasa akan dirugikan atau sebaliknya akan diuntungkan tentunya akan merapatkan barisan atau melakukan konsolidasi berdasarkan pembelahan etnik, agama, atau golongan. Sejarah dan persepsi buruk itu mudah sekali dieksploitir untuk membangkitkan kesadaran kolektif dan memperkuat ikatan kelompok.

Perkembangan selanjutnya terjadilah yang disebut pembelahan horizontal yang ditandai dengan perbedaan antara kelompok etnis yang satu dengan yang lainnya. Jika pembelahan horizontal ini semakin tajam maka terjadi

persaingan yang bukan mustahil akan berujung pada bentuk permusuhan secara kolektif. Jika tidak ada resolusinya, seperti perdamaian dan dialog untuk membangun saling pengertian guna meredakan ketegangan dan permusuhan, maka pada puncaknya akan terjadi semacam pertikaian kolektif dalam bentuk kekerasan massal.

Khusus di Provinsi Lampung tahun ini akan mengagendakan beberapa pilkada di setiap daerah. Hal ini sangat rentan sekali terjadinya politisasi etnis ataupun mobilisasi dari berbagai pihak terhadap suatu perkumpulan etnis tertentu. Di lain pihak banyak para calon yang sudah mendapat atau pun mengklaim mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Kemudian ada juga beberapa calon kepala daerah yang mendapatkan posisi penting pada suatu organisasi-organisasi yang berbasis massa, seperti paguyuban dan sebagainya. Hal ini tidak lain sebagai salah satu upaya kedua belah pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing.

Menjelang Pemilihan Gubernur Lampung 2008, masyarakat cukup banyak dilihat pada advertorial di media-media cetak yang isinya seputar dukung mendukung bakal calon gubernur dari berbagai pihak. Ironisnya, dukungan-dukungan ini juga mengatasnamakan etnis lain, khususnya yang berdomisili di Provinsi Lampung, seperti Perguruan Paku Banten yang mendukung pencalonan kembali Drs. Sjachroedin Z.P sebagai Gubernur Lampung, dan sebagainya. Memang ini hanya suatu bentuk apresiasi sekelompok masyarakat yang menyatakan dukungannya dalam suatu negara yang demokratis, akan tetapi tanpa disadari hal ini justru akan menimbulkan

polemik baru yang menurut pandangan penulis cukup krusial dan berpotensi menimbulkan konflik, apabila ketika dukungan yang diberikan mengatasnamakan suku, agama atau ras tertentu.

Terdapat suatu tanda tanya besar terhadap tindakan ataupun manuver yang dilakukan kedua belah pihak tersebut. Mengapa banyak calon kepala daerah pihak-pihak seperti organisasi-organisasi massa ataupun paguyuban merasa perlu untuk menjalin kerjasama tersebut. Padahal, latar belakang dari calon kepala daerah tersebut tidak ada hubungannya dengan organisasi-organisasi massa tersebut. Kecenderungan politisasi etnis dimungkinkan terjadi pada kerjasama kedua belah pihak tersebut.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti ada hubungan apakah antara Perguruan Paku Banten dan beberapa kepala daerah yang bertarung pada pilkada. Untuk kasus pada penelitian ini, ada beberapa calon yang menggunakan Perguruan Paku Banten sebagai salah satu alat untuk memenangkan Pilkada selain partai politik. Berdasarkan analisis penulis sendiri, ada anggapan apabila para calon kepala daerah tidak mendapat dukungan dari warga Banten, calon tersebut akan kalah.

Beberapa kepala daerah mempunyai hubungan dekat dengan paguyuban Paku Banten tersebut. Tetapi penulis lebih tertarik membahas dan menggambarkan ada apa dibalik hubungan gubernur Lampung terpilih periode 2009-2014, Drs Sjachroedin ZP, S.H dengan Paguyuban Paku Banten. Hal ini dikarenakan Perguruan Paku Banten mendukung penuh Sjachroedin ZP dalam pilgub 2008 (Radar Lampung edisi 7 Juli 2008).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terjadi Politisasi pada Organisasi Massa Perguruan Paku Banten dalam mendukung terpilihnya Drs. Sjachroedin Z.P pada Pemilihan Gubernur Lampung 2008
2. Apakah Faktor Kepemimpinan Hi. Mukri M.Z sebagai Guru Besar pada Paku Banten dapat mempengaruhi Warga Banten dalam menentukan pilihan.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Politisasi pada Organisasi Massa Perguruan Paku Banten dalam mendukung terpilihnya Drs. Sjachroedin Z.P sebagai Gubernur Lampung periode 2009-2014 dapat terjadi serta bagaimana tanggapan anggota dari Paku Banten dan warga Banten itu sendiri dalam menanggapi kebijakan tersebut

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dinamika politik lokal, khususnya menjelang Pemilu yang akan berlangsung tahun 2010.
2. Mengetahui isu-isu etnis dalam Pemilu akan mempengaruhi dukungan terhadap calon tertentu.

3. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi partai politik ataupun penggiat politik dalam menentukan strategi memanfaatkan politisasi etnis untuk mendapatkan simpati masyarakat dan mendapatkan dukungan masyarakat.